PENGEMBANGAN APLIKASI e-LITIGASI KANTOR HUKUM DI SURABAYA

Budi Endarto¹, Dani Teguh Wibowo², Erry Meta³

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

²Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

³Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

budiendarto@uwp.ac.id, pedhany@gmail.com, errymeta@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi pergeseran model bisnis pada setiap kegiatan usaha termasuk terhadap kegiatan usaha layanan jasa hukum yang harus segera disikapi oleh setiap kantor hukum. Terlebih dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, semakin menuntut setiap kantor hukum untuk mengembangkan sistem informasinya dalam memberikan layanan jasa hukum. Permasalahan yang ada pada dua kantor hukum mitra yakni SMB Law Office dan Kukuh Pramono and Partner, bahwa kedua kantor hukum tersebut belum menerapkan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan layanan jasa hukum penanganan perkara litigasi. Untuk itu tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengembangkan dan menerapkan aplikasi *e-Litigasi* pada dua kantor hukum mitra. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah mengidentifikasi kepemilikan serta penguasaan mitra akan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi dan penerapan melalui sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi *e-Litigasi* pada kantor hukum mitra. Hasil dari kegiatan pengembangan aplikasi *e-Litigasi* yang diterapkan pada kantor hukum mitra, menjadikan kedua kantor mitra lebih mudah dalam memberikan layanan jasa hukum berbasis teknologi informasi khususnya pada administrasi dokumen perkara secara elektronik serta memberikan kemudahan akses kepada klien untuk memonitor perkembangan penanganan perkaranya.

Kata Kunci: Kantor Hukum, *Disruption*, *e-Litigasi*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, sangat berpengaruh terhadap pergeseran orientasi layanan jasa hukum pada kantor hukum. Perkembangan teknologi informasi mendorong pergeseran orientasi model bisnis, dimana kondisi semacam ini oleh Rhenald Kasali disebut sebagai *disruption*, yang artinya bahwa suatu inovasi berbasis teknologi

informasi akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Beberapa konsekuensi dari era *disruption* dewasa ini, oleh Rhenald Kasali dijelaskan secara panjang lebar bahwa hal itu bukan sekedar *change* biasa, akan tetapi berdampak luas yang mencakup tiga hal yakni: *Pertama*, *disruption* menyerang hampir semua *incumbent* (pelaku lama, para pemimpin pasar), baik itu produk-produk atau perusahaan-perusahaan ternama, sekolah atau

universitas terkemuka, organisasi-organisasi sosial, partai politik, maupun jasa-jasa yang sudah kita kenal. *Kedua*, bak air bah yang mencari jalan menuruni dataran yang lebih rendah, *disruption* menciptakan pasar baru yang selama ini diabaikan *incumbent*, yaitu kalangan yang menduduki dasar piramida. Berkat kelas menengah baru yang dulu di bawah, pasar yang digeluti *incumbent* membesar. Namun, ketika barang atau jasa pendatang baru yang dulu dinilai berkualitas rendah diperbaiki pelayanannya, produk *branded* (milik *incumbent*) sekalipun bisa berubah menjadi komoditas dan perlahan-lahan berpotensi menguasai pasar yang dikuasai *incumbent*. Sekuat apa pun *brand loyalty* yang telah dibangun *incumbent* melalui strategi pemasaran konvensional, posisi *incumbent* tetap terancam. *Ketiga*, *disruption* menimbulkan dampak deflasi (penurunan harga) karena *searching cost* and *transaction cost* praktis menjadi nol rupiah. *Kedua* jenis biaya ini umumnya hanya dikenal oleh generasi *millennials* berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu timbul gerakan berbagi (*sharing resources*) yang mampu memobilisasi pemakaian barang-barang konsumsi ke dalam kegiatan ekonomi produktif.

Kajian tentang *disruption* juga ditemukan pada profesi hukum sebagaimana yang dikembangkan oleh *Harvard Law School Center on the Legal Profession* dalam artikelnya yang bertema “*Disruptive Innovation in Legal Services*” dimana dalam artikel tersebut dinyatakan disebutkan bahwa ... “*Lawyers are practicing in a market that is “on the verge of disruption” and “smart firm will take steps now”*”. Artinya seorang lawyers atau kantor hukum harus melakukan perubahan atau langkah strategis disaat menghadapi era *disruption* dan suatu kantor hukum yang cerdas harus memulai perubahan dari sekarang apabila tidak mau tertinggal. Dari uraian diatas terlihat begitu masifnya pergeseran model bisnis kantor hukum di era *disruption* yang didorong oleh arus globalisasi, liberalisasi serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian maka, pergeseran model bisnis ini harus segera disikapi oleh setiap kantor hukum apabila tidak mau tenggelam dalam persaingan yang semakin kompetitif ini.

Dalam konteks pergeseran layanan jasa hukum, sebetulnya jauh-jauh hari telah di ingatkan

oleh *Richard Susskind*, dimana kondisi ini disebut sebagai pergeseran *legal paradigm*. Yang dimaksudkan dengan *legal paradigm* itu sendiri adalah suatu revolusi di bidang hukum sebagaimana dinyatakan “*a revolution in law, after which many of the current features of contemporary legal systems which we now take for granted will be displaced by a new set of underlying premises and presuppositions*”. Lebih konkrit lagi disampaikan juga bahwa dengan perkembangan teknologi informasi maka perubahan paradigma pada layanan jasa hukum akan mengalami pergeseran “*From print base to IT Based Legal Systems*”, yang artinya, “*legal practice and administration of justice will no longer be dominated by print and paper in tomorrow’s legal paradigm. Instead, legal systems of the information society will evolve rapidly under the considerable influence of ever more powerful information technologies*”.

Di beberapa negara, pergeseran paradigma layanan jasa hukum pada kantor hukum yang lebih dikenal dengan *new business models for legal services* banyak di inisiasi oleh asosiasi profesi. Salah satunya yang terjadi di New Zealand, dimana Bar Association bekerjasama dengan University of Otago mempersiapkan *New Business Model for Legal Services* melalui *Working Group on Access to Justice*. Pergeseran paradigma layanan jasa hukum juga terjadi di Indonesia, hal itu lebih cepat akselerasi perubahannya dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Karena maka mau tidak mau akan mendorong setiap kantor hukum untuk segera mengembangkan layanan jasa hukumnya dengan berbasis teknologi informasi khususnya layanan jasa hukum pada bidang litigasi.

Melihat fenomena perubahan yang fundamental di bidang layanan jasa oleh kantor hukum sebagaimana digambarkan sebelumnya, maka cukup menarik apabila disusun kegiatan pengabdian dengan tema “*Pengembangan Aplikasi e-Litigasi pada Kantor Hukum di Surabaya*”. Pelaksanaan program kegiatan ini di bagi menjadi tiga tahapan yakni tahap pertama melakukan

pemetaan terhadap penggunaan teknologi informasi pada setiap kantor hukum mitra dengan mempertimbangkan kebutuhan dari masing-masing kantor hukum. Dari hasil pemetaan akan diperoleh gambaran kebutuhan masing-masing mitra yang selanjutnya akan di susun perencanaan pembangunan infrastruktur kantor hukum digital. Tahap ketiga adalah kegiatan pengembangan dan pelaksanaan atau implemetasi desain arsitektur system pada kantor hukum mitra.

METODE

Dalam perubahan model bisnis suatu kantor hukum tidak hanya difokuskan pada pembangunan dan pengembangan system informasi saja. Akan tetapi yang juga patut dipertimbangkan adalah membangun budaya penggunaan system informasi tersebut kepada seluruh elemen mitra termasuk staf operasional yang bertugas mengaplikasikan sistem informasi layanan jasa hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Pemetaan Kebutuhan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Kantor Hukum

Pemetaan ini diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dari masing-masing kantor hukum mitra karena dimungkinkan masing-masing kantor hukum mitra memiliki karakter dan budaya yang berbeda dalam memberikan layanan jasa hukum. Dari hasil pemetaan yang dilakukan selanjutnya disusun rencana kegiatan yang berisikan program kegiatan, kerangka waktu pelaksanaan kegiatan serta penyusunan anggaran biaya yang diperlukan

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kantor Hukum Digital

Pada tahap ini, akan berangkat dari hasil pemetaan yang telah dilakukan sehingga diketahui gambaran tentang infrastruktur kantor hukum digital yang dibutuhkan. Dalam perencanaan infrastruktur kantor hukum digital juga diperlukan kajian tentang kebutuhan masing-masing kantor hukum dengan memperhatikan kebutuhan serta karakterteristik yang dikembangkan pada masing-masing kantor hukum.

Pengembangan Design Architecture System Pada Kantor Hukum

Pada tahap pengembangan dan pelaksanaan program ini dimulai koordinasi dengan pengembang system informasi dimana pengembangan system informasi berangkat dan berbasis dari desain arsitektur system yang direncanakan. Setelah system infomasi dibangun berdasarkan desain arsitektur, maka langkah berikutnya adalah mengembangkan system informasi dengan dibantu pihak pengembang aplikasi. Selanjutnya melaksanakan sosialisasi dan asistensi penggunaan system informasi e-litigasi kepada staf dan lawyer masing-masing kantor hukum.

Pada tahap akhir kegiatan adalah tahap penyusunan laporan kegiatan dengan mengelaborasi seluruh kegiatan pengabdian mulai dari tahap pemetaan, penyusunan rencana kegiatan sampai dengan pengembangan system informasi dan pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan. Dari laporan yang disusun dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang dirumuskan. Disamping itu dalam laporan kegiatan di rumuskan saran terkait dengan perencanaan kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Kebutuhan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Kantor Hukum

Dari pemetaan yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa layanan jasa hukum yang telah di berikan oleh kedua kantor hukum mitra pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah layanan jasa hukum

No.	Kantor Hukum	Jumlah jasa hukum litigasi	Jumlah jasa hukum non-litigasi	Jumlah jasa hukum
1	SMB Law Office	15 layanan jasa hukum	3 layanan jasa hukum	18
2	Kukuh Pramono	9 layanan jasa	1 layanan jasa	10

	and Partner	hukum	hukum	
--	-------------	-------	-------	--

Sumber: Diolah dari laporan layanan jasa hukum tahun 2018

Dari hasil rekapitulasi jumlah layanan jasa hukum tahun 2018 yang diberikan oleh kedua mitra sebagaimana disajikan dalam tabel 1 diatas, menunjukan bahwa layanan jasa hukum pada kedua kantor hukum mitra lebih didominasi layanan jasa hukum litigasi atau layanan jasa hukum pada penyelesaian sengketa di pengadilan dibandingkan dengan layanan non-litigasi. Dengan demikian maka, pengembangan aplikasi yang lebih diperlukan adalah untuk memberikan layanan jasa hukum litigasi. Terhadap hasil pemetaan tersebut, selanjutnya dipresentasikan kepada kedua kantor hukum mitra yang berkaitan dengan hasil pemetaan dan kebutuhan aplikasi yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Dari presentasi dan diskusi yang dilakukan disepakati bahwa aplikasi yang di prioritaskan untuk dibangun adalah aplikasi e-litigasi.

Gambar 1. Presentasi penyusunan rencana

pembangunan aplikasi e-litigasi

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kantor Hukum Digital

Dalam mengembangkan system informasi pada suatu kantor hukum, merujuk pada pendapat Granat dan Kimbro, yang menyarankan langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun infrastruktur kantor hukum digital terlebih dahulu. Menurutnya perencanaan infrastruktur kantor hukum digital, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal pokok yang harus dipersiapkan yaitu pembangunan *Web or Client Portal*, *Designing Information Architecture of Law Firm* and *Data Structure*. Berangkat dari gambaran tersebut Budi Endarto dkk, lebih menyederhanakan perencanaan pembangunan infrastruktur kantor hukum digital. yakni melalui pembangunan *Client Portal*, *Information Sistem* dan *Digital Data Room* sebagaimana diuraikan fungsi dan kegunaan masing-masing bagian infrastruktur sebagai berikut : 1) *Client Portal*, berfungsi sebagai wahana interaksi antara lawyer dengan klien. Pada *client portal* disajikan beberapa informasi antara lain profil *law firm*, profil *lawyer*, layanan jasa hukum dan sistem informasi layanan jasa hukum; 2) *Information System*, dikembangkan sebagai media layanan jasa hukum dalam bentuk aplikasi dan memiliki kemiripan dengan *client portal*, yakni online, berbasis web; 3) *Digital Data Room (DDR)* merupakan alternatif penyimpanan dokumen klien yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dokumen, dimana dokumen yang telah diupload hanya bisa diakses oleh yang berkepentingan saja atau yang memiliki *user name* dan *password*. Pengembangan DDR adalah untuk menggantikan *traditional paper data room* dengan menggunakan akses internet dan proses login menggunakan *user name* dan *password*, sehingga *lawyer* dan team dapat mengakses secara bersamaan. Untuk menjaga keamanan data klien dibangun sebuah server yang dirancang dengan sistem penyimpanan namun tidak menggunakan *Cloud-Storage* akan tetapi berbasis *Local Storage*.

Dari hasil pemetaan terhadap kedua mitra, hanya SMB Law Office yang telah memiliki *client portal*, dengan demikian dalam kegiatan ini disepakati untuk dibangun *client portal* pada kantor

hukum Kukuh Pramono and Partners. Selanjutnya diketahui bahwa pada kedua kantor hukum mitra tidak memiliki system informasi dan DDR, maka untuk memenuhi kebutuhan layanan jasa hukum dibidang litigasi, terhadap kedua kantor hukum mitra perlu dibangun *Information System* dan *Digital Data Room*.

Gambar 2. Sosialisasi dan asistensi pengembangan infrastruktur kantor hukum digital

Pengembangan *Design Architecture System* Kantor Hukum

Setelah infrastruktur kantor hukum digital telah selesai dibangun, maka tahap selanjutnya adalah pengembangan *design architecture system* informasi kantor hukum. Pengembangan system informasi kantor hukum dapat menggunakan konsep *Knowledge Manamement Systems*. Didalam pengembangan konsep *Knowledge Manamement Systems*, *Petter Gottschak* membagi menjadi beberapa type atau modul yang harus dikembangkan diantaranya : 1) **Administrative data**, *includes all of the nuts and bolts information about firm operations, such as hourly billing rates for lawyers, client names and matters, staff payroll data, and client invoice data*; 2) **Declarative knowledge**, *is knowledge of the law, the legal principles contained in statutes, court opinions and other sources of primary legal authority*; 3) **Procedural Knowledge**, *“procedural” is knowledge of the mechanics of complying with the law's requirements in a particular situation: what documents are necessary to transfer an asset from*

Company A to Company B, or what forms must be filed where to create a new corporation.

Ketiga type modul tersebut yakni *administrative data*, *declarative data* dan *procedural data* itulah yang sangat diperlukan sebagai *basic* pengembangan aplikasi e-litigasi. Dan untuk melengkapi aplikasi e-litigasi dilanjutkan pengembangan subsistem aplikasi yang dikenal dengan *electronic document and records management systems* (“EDRMS”). EDRMS didefinisikan “*an automated software application designed to assist you with the creation, management, use, storage and disposal of information and records*”. Dari pengertian dan batasan EDRMS tersebut, setidaknya yang harus dikembangkan dalam kegiatan ini adalah modul *client file* dan *digital library* hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa : 1) *Client Files*, disini berbeda dengan *client file* pada masa pre-digital, terlebih pada *era mobile*. Pada *era mobile*, *client file* harus berbentuk *digital files* yang bertujuan untuk “*to reduce or eliminate some recurring problems with hard copy files. The protability of digital files poses significant challenges to firms attempting to mitigate the effects of lawyer mobility*”; 2) *Design of Digital Law Libraries*, sangat diperlukan dimana pengembangannya berangkat dari pemahaman bahwa praktek hukum dikategorikan sebagai penelitian hukum terapan. Dalam melaksanakan penelitian hukum terapan, memerlukan sumber-sumber hukum penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Di dalam *digital law libraries*, inilah yang akan digunakan untuk menyimpan semua dokumen dan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dalam bentuk *e-file*.

Dalam mengembangkan EDRMS pada kedua kantor hukum harus menyesuaikan atau menyelaraskan dengan aplikasi e-Court yang

dikembangkan berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019. Dimana dalam PERMA tersebut aplikasi e-Court adalah system informasi yang merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/ tata usaha negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dengan perkembangan layanan peradilan akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Adapun ruang lingkup aplikasi e-court antara lain pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online, dokumen persidangan, dan pemanggilan elektronik.

Senada dengan pembangunan aplikasi *e-court*, aplikasi *e-litigasi* yang dikembangkan untuk kepentingan kedua mitra dalam kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya untuk mengajukan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara secara online. Jadi dalam pengembangan aplikasi *e-litigasi* dalam kegiatan ini memiliki persamaan bahkan menyelaraskan dengan aplikasi e-Court.

Gambar 3. Screenshoot aplikasi system informasi e-litigasi

KESIMPULAN

Dari uraian tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pengembangan aplikasi e-litigasi pada kantor hukum di Surabaya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 1)Perkembangan teknologi informasi merubah tatanan berbagai jenis model bisnis yang disebut sebagai era *disruption*, dimana pengembangan teknologi pada suatu industri berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Pada era disruption, teknologi lama yang serba fisik akan tergantikan dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar- benar baru dan lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Hal ini juga harus di antisipasi dalam pengelolaan kantor hukum, apabila tidak ingin di linds dengan perubahan tatanan bisnis yang begitu masif. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat ditempuh langkah perubahan dengan menggunakan konsep *Knowledge Management Systems*; 2)Untuk mengantisipasi pergeseran model bisnis kantor hukum dalam era disruption, diperlukan pembangunan teknologi informasi berupa *client portal*, sistem informasi dan *digital data room*. Selanjutnya dalam sub system yang lebih kecil dan teknis perlu pengembangan konsep *electronic document and records management systems* ("EDRMS") yang didalamnya dikembangkan *client file* dan *digital library*; 3) Dengan diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengembangan konsep KMS dn EDRMS pada kantor hukum sangat diperlukan mengantisipasi penerapan aplikasi e-court dalam layanan jasa hukum litigasi di Pengadilan.

SARAN

Sebagai saran dari kegiatan ini, semua a hasil pembangunan dan pengembangan system informasi kantor hukum idealnya diperlukan

perlindungan hukum melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Fungsi Hak Cipta adalah melindungi ciptaan yang berupa sistem informasi kantor hukum dari para kompetitornya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pengembangan Aplikasi e-Litigasi Pada Kantor Hukum di Surabaya”. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Panitia Konferensi Nasional PKM-CSR yang memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat dalam Konferensi Nasional ke-5 PKM-CSR tahun 2019.

REFERENSI

- Allison D Rhodes & Robert W. Hillman, *Client Files and Digital Law Practices : Rethinking Old Concepts in an Era of Lawyer Mobility*, University of California at Davis School of Law, 2010, h. 898.
- Cronin, Bridgate Toy, John Billington QC, Matthew Smith and Kalyani Dixi, 2016, *New Business Models For Legal Services*, University of Otago, Legal Issue Center For The New Zealand Bar Association, New Zealand.
- Deborah L. Edwards and Dirk E. Mahling, 1997, *Toward Knowledge Management Systems in the Legal Domain*, Proceedings of the International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work Group’97, USA: The Association of Computing Machinery ACM.

- Endarto, Budi, Fitra Mardiana, Muhammad Harist Murdani, 2016, “*Re-orientation the Teaching of High Legal Education in Indonesia*”, IISTE, Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 52, ISSN (Paper) 2224-3240 and ISSN (Online) 2224-3159.
- Granat, Richard S And Stephanie Kimbro, 2013, *The Teaching Of Law Practice Management And Technology in Law School : A New Paradigm*, Chicago-Kent Law Review, Volume 88, Issue 3 Justice, Lawyering and Legal Education in the Digital Age.
- Harvard Law School Center on the Legal Profession, 2015, “*Disruptive Innovation in Legal Services*”, The Pragtice.
- Kasali, Rhenald, 2017, *Disruption “ Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi, motivasi saja tidak cukup”*, Menghadapi Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- National Archives of Australia, *Electronic document and records management system* <<http://alrc.gov.au/publication/6.%20Documentary%20Evidence/background>>at [6.1.]
- Petter Gottschak, 2000, *Knowledge Management System : A Comparision of Law Firms and Consulting Firms*, Informing Science, Volume 3 No. 3.
- Susskind, Richard, 1996, *The Furture of Law, Facing the Chalenges of Information Technology*, Clarendon Press, Oxford University Press Inc, New York.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.